

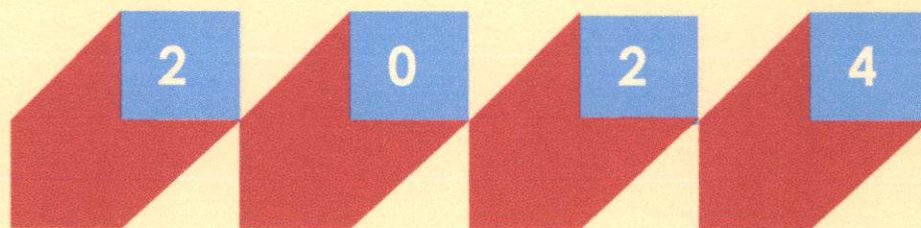


Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Luwu Timur

LAPORAN KINERJA TRIWULAN 1

INSTANSI PEMERINTAH



KATA PENGANTAR

Sebagai wujud penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan akuntabel serta untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Triwulan I Tahun Anggaran 2024. Laporan Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan dikaitkan dengan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Renstra Badan Pendapatan Daerah menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan unit kerja Badan Pendapatan Daerah pada periode tahun 2021 sampai dengan 2026. Untuk mewujudkan tujuan yang tertuang dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Kab. Luwu Timur, dijabarkan dalam satu sasaran strategis, yaitu Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah dengan Indikator Persentase Tercapainya Penerimaan Pendapatan Daerah. Dalam pencapaian sasaran perlu menyesuaikan dan mempertimbangkan tantangan – tantangan yang ada dalam pencapaian target agar pelaksanaan berjalan lebih efektif dan efisien.

Penyusunan dan penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang berisi tentang prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan merupakan kewajiban setiap SKPD sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini dapat dijadikan bahan dalam peningkatan pelayanan dan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan program dan kegiatan di tahun mendatang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Triwulan I Tahun Anggaran 2024 ini merupakan cerminan prestasi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja pada Tahun Anggaran 2024, sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau pun kegagalan dari

pelaksanaan visi, misi dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Triwulan I Tahun Anggaran 2024 ini disampaikan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan tersebut, semoga dapat bermanfaat, khususnya bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Malili, April 2024

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Luwu Timur



MUHAMMAD SAID, SE,MM

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP : 19790313 200502 1 010

RINGKASAN EKSEKUTIF

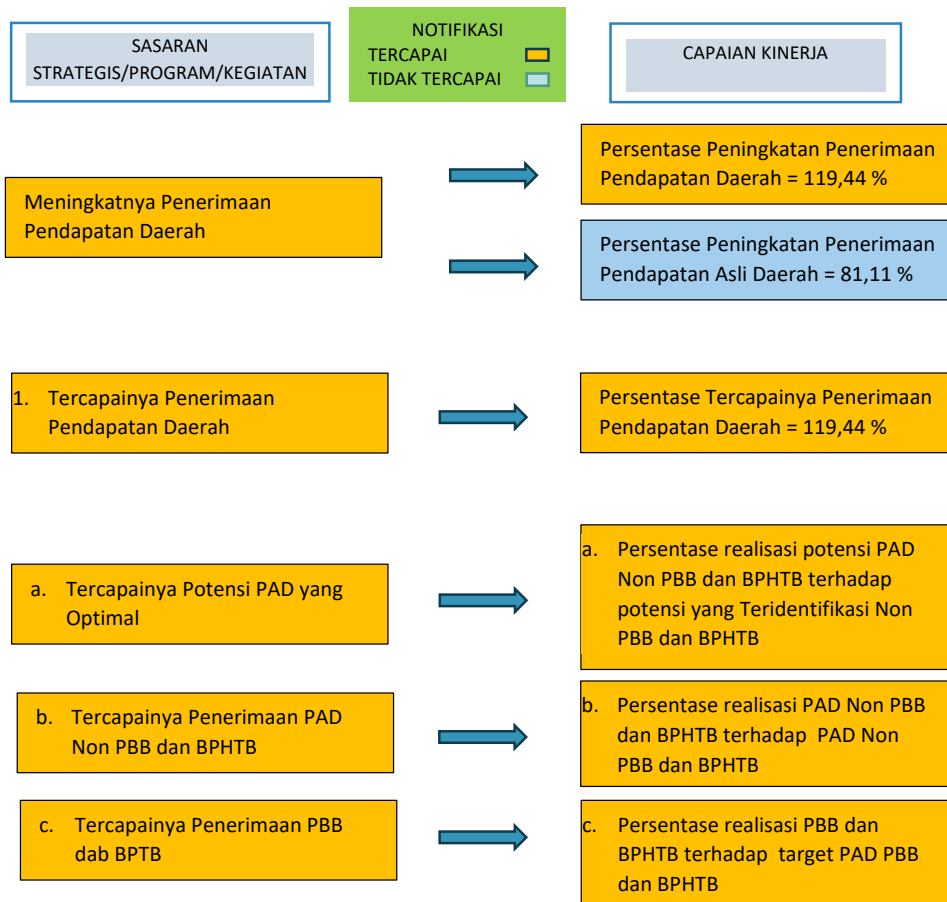
VISI

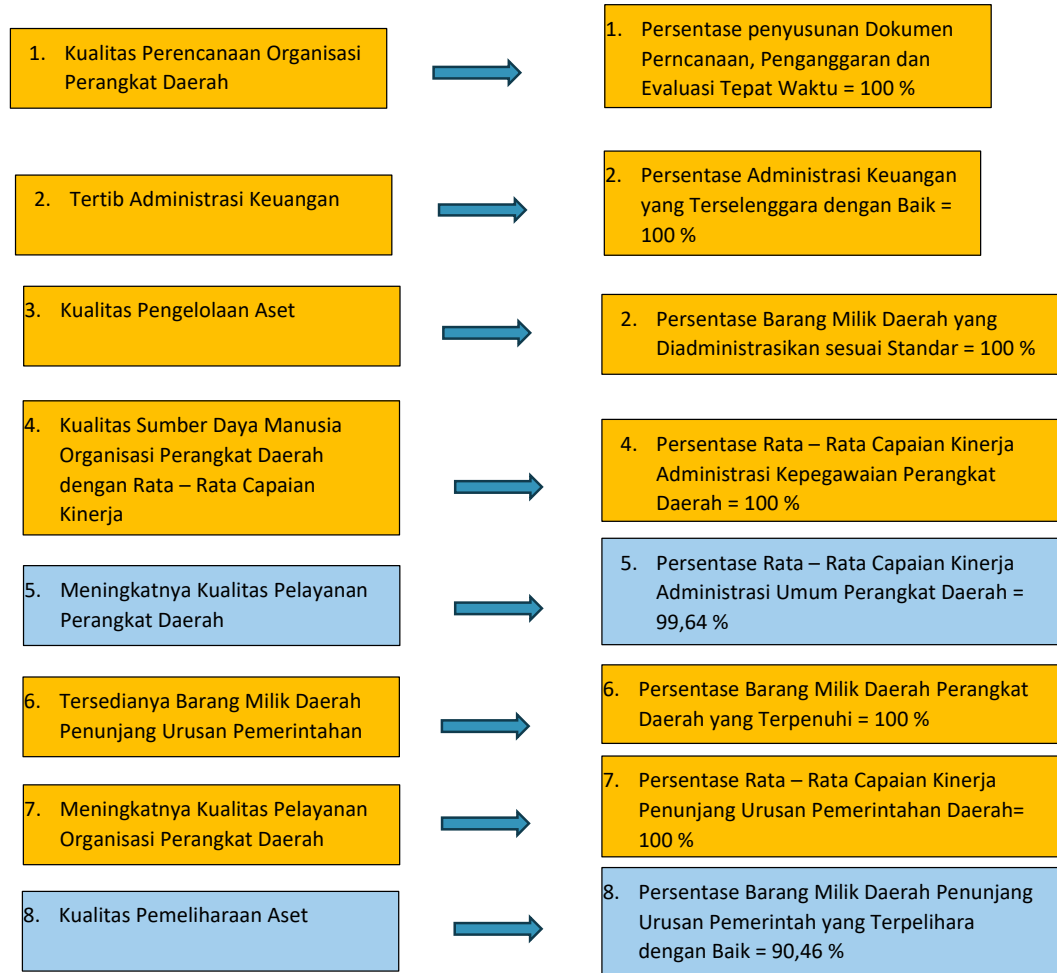
"Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya"

MISI

MISI ke – 4 RPJMD

"Menciptakan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Lebih Baik"





DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR GRAFIK	vi
DAFTAR DIAGRAM	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 . Tugas dan Fungsi	
1.2. Struktur dan Organisasi	
1.3. Aspek Strategis Organisasi	
1.4. Isu Strategis/Permasalahan	
1.5. Sistematika Laporan	
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Target Kinerja Tahun 2021 – 2026	
1. Visi	
2. Misi	
3. Indikator Kinerja Sasaran	
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	
3.2. Analisis Capaian Kinerja.....	
3.3. Realisasi Anggaran	
BAB IV PENUTUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran dan Target Kinerja Sasaran RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur 2021 – 2026.....
Tabel 2	Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....
Tabel 3	Program dan Pagu Anggaran 2024.....
Tabel 4	Tingkat Akuntabilitas Kinerja
Tabel 5	Pengukuran Capaian Kinerja.....
Tabel 6	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran ke -1.....
Tabel 7	Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Triwulan I TA.2024.....
Tabel 8	Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Triwulan I Tahun 2024..... Dengan Tahun Lalu dan Beberapa tahun Terakhir.....
Tabel 9	Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan Target Akhir Jangka Menengah
Tabel 10	Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan dengan skala Kabupaten se – Provinsi Sulawesi Selatan.....
Tabel 11	Program Kerja yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.....
Tabel 12	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Indikator Kinerja Sasaran 1 ...
Tabel 13	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Sasaran 1
Tabel 14	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke -2.....
Tabel 15	Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Triwulan I Tahun 2024.....
Tabel 16	Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir
Tabel 17	Perbandingan Capaian Tahun 2024 Terhadap target Jangka Menengah (2021-2016).....
Tabel 18	Perbandingan target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Skala Kabupaten se Provinsi Sulawesi Selatan.....
Tabel 19	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Indikator Kinerja Sasaran-2

Tabel 20	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....
Tabel 21	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah.....
Tabel 22	Capaian Indikator Kinerja Program Pendukung.....
Tabel 23	Realisasi Anggaran berdasarkan program, kegiatan, sub kegiatan Triwulan I Tahun 2024.....
Tabel 24	Permasalahan dan Solusi terkait penyerapan anggaran.....

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur... ..
--

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024

Grafik 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Badan Pendapatan Daerah Kabuoaten Luwu Timur Tahun 2024

Grafik 3 Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-1 Tahun 2024.....

Grafik 4 Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke 2 Tahun 2024.....

Grafik 5 Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2024.....

DAFTAR DIAGRAM

Gambar 1 Diagram Serapan Anggaran Triwulan I Tahun 2024

LAMPIRAN- LAMPIRAN

- Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi LAKIP Tahun 2022
- Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi Laporan Kinerja (LKj) Triwulan IV Tahun 2023
- Perjanjian Kinerja Eselon II Tahun 2024
- Indikator Kinerja Utama (IKU)
- Pohon Kinerja

BAB

1

PENDAHULUAN



1. PENDAHULUAN

1.1. TUGAS DAN FUNGSI

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dipimpin oleh Kepala Badan yang secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur. Berdasarkan peraturan tersebut, Badan Pendapatan Daerah mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

Tugas : Membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang keuangan

Fungsi : - Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;

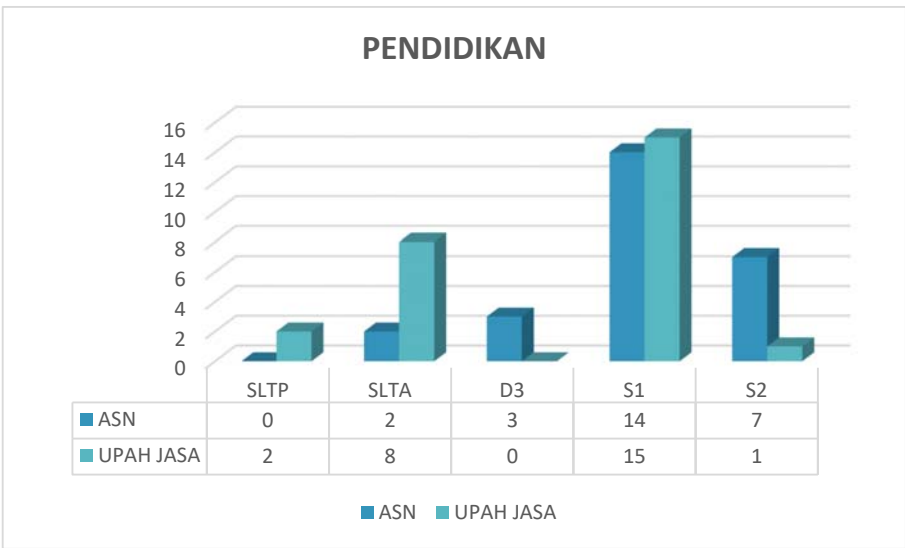
- Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan pendapatan daerah;
- Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- Pelayanan administratif dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Badan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

1.2. STRUKTUR ORGANISASI

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur dibentuk melalui Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, berdasarkan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 52 orang, terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) 25 orang, P3K 1 orang, dan Tenaga Upah Jasa 26 orang (Tenaga Administrasi 23 orang, Cleaning Service 1 orang, Sopir 1 orang dan Security 1 orang) . Struktur tingkat pendidikan SDM Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur tercantum pada diagram berikut :

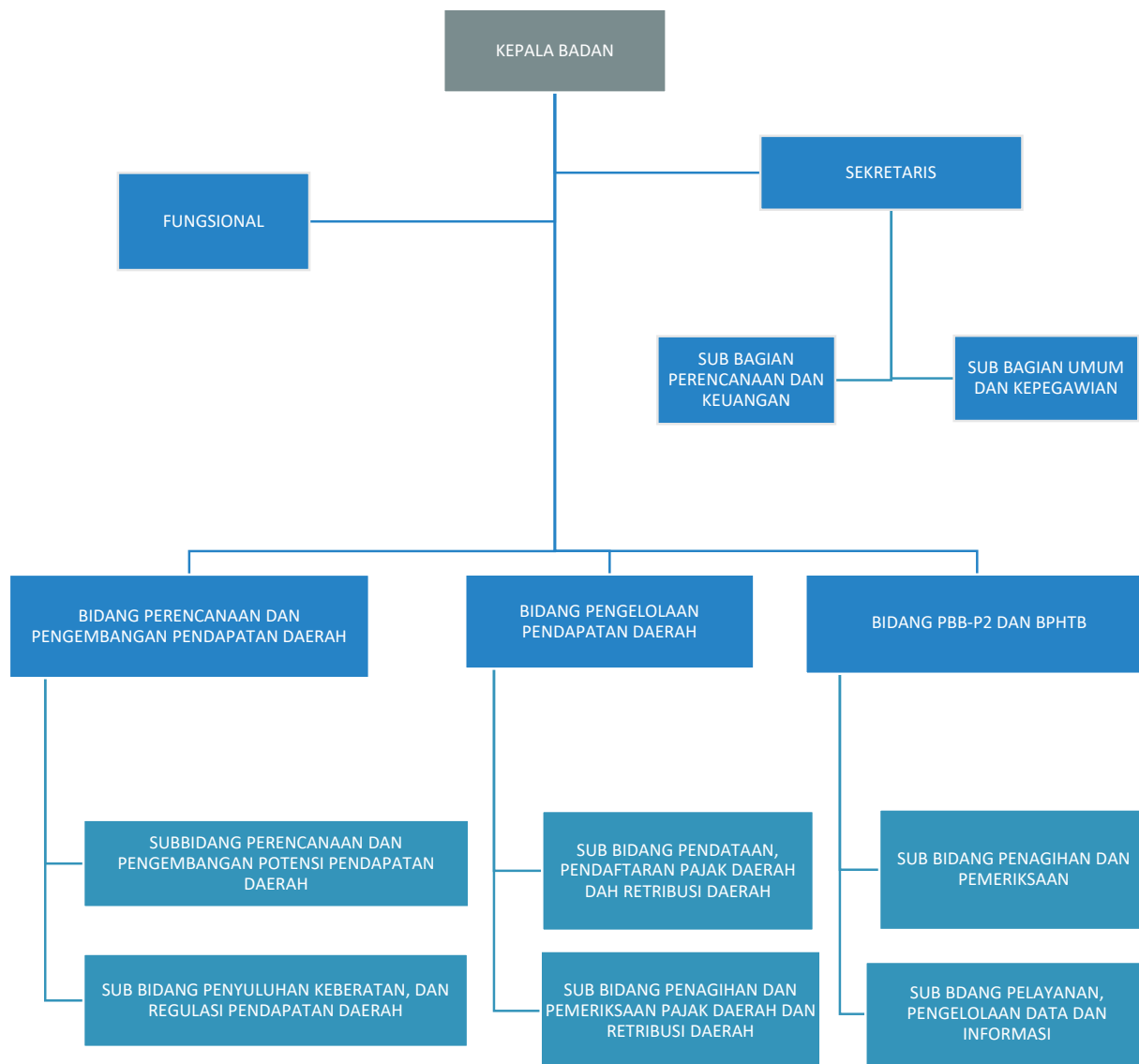


Grafik 1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur



Grafik 2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur

Gambar 1
Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024



1.3 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Untuk mendukung mewujudkan rumusan Visi dan Misi, beserta Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, maka dibutuhkan penetapan upaya untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam bentuk Strategi dan Arah Kebijakan, dimana strategi adalah langkah – langkah berisikan program – porogram indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara itu kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan secara komprehensif tentang bagaimana mencapai Tujuan dan Sasaran dengan efektif dan efisien.

Agar Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur dapat tercapai dengan baik, maka diperlukan Strategi dan Kebijakan Operasional sesuai dengan ketentuan/regulasi oleh pihak berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan Program/Kegiatan guna tercapainya keselarasan dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, pada lingkup internal Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Adapun rumusan penetapan strategi yang akan dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah adalah :

1. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Bapenda

Rumusan Strategi merupakan pernyataan penjelasan bagaimana Tujuan dan Sasaran akan dicapai, kemudian selanjutnya diperjelas dengan serangkaian Arah Kebijakan. Perumusan Kebijakan bertujuan untuk menjelaskan cara yang ditempuh untuk menerjemahkan Strategi ke dalam rencana program-program prioritas pembangunan. Kebijakan-kebijakan memberikan arahan kongkrit bagi penentuan program-program berdaya ungkit dalam menerjemahkan rumusan strategi tersebut.

1.4 ISU STRATEGIS/PERMASALAHAN

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur merupakan unsur penunjang dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 90 Tahun 2021 telah diatur tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur antara lain membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang keuangan serta berfungsi merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah dengan memberikan dukungan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur mendukung dan mewujudkan tercapainya sasaran strategis Daerah Kabupaten Luwu Timur yaitu ***“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan (S8)”***. Namun dalam pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah di Kabupaten Luwu Timur masih terdapat permasalahan antara lain :

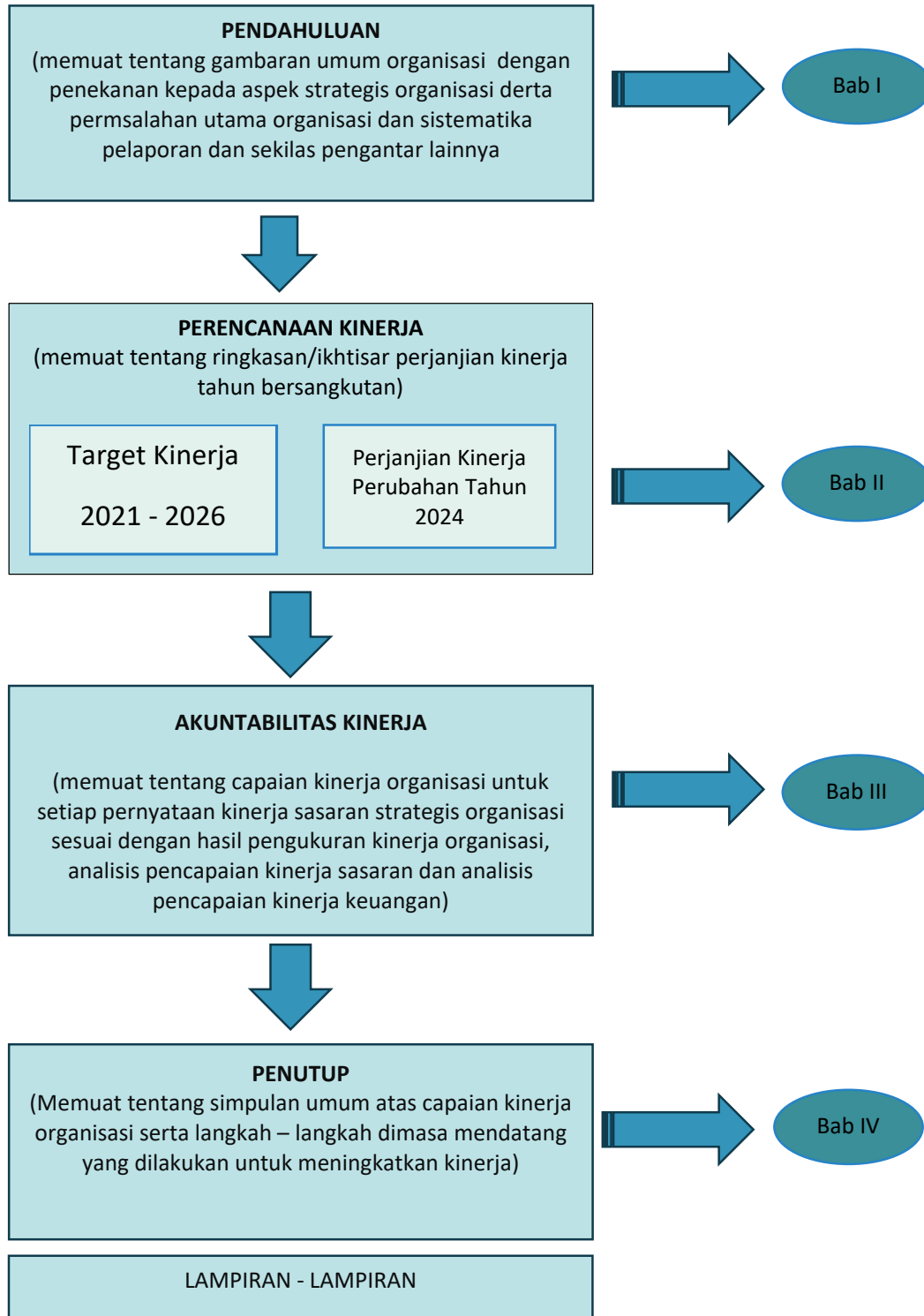
1. Belum optimalnya analisa terhadap potensi – potensi pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Kurangnya sosialisasi terhadap peraturan perundang – undangan tentang pajak dan retribusi kepada masyarakat;
3. Masih rendahnya kapasitas sumber daya aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing;
4. Belum optimalnya pengelolaan pemungutan pajak dan retribusi;
5. Belum optimalnya pemanfaatan SDM, sarana dan prasarana dan dukungan anggaran untuk menggali potensi – potensi pajak dan retribusi yang ada
6. Terbatasnya tenaga dan kemampuan aparatur Pemungut dalam upaya penggalan potensi penerimaan daerah khususnya di daerah – daerah
7. Kurangnya koordinasi yang sinergis dalam internal perangkat daerah dan eksternal OPD lain.

1.5 SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun Anggaran 2024 ini pada dasarnya adalah suatu media untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur. Capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja Triwulan I Tahun 2024 yang telah diselaraskan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, yang merupakan keberhasilan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan di masa datang. Artinya, terhadap capaian yang telah mencapai atau melebihi target (sudah baik) agar tetap dipertahankan, sedangkan terhadap capaian kinerja yang masih di bawah target untuk masa mendatang dapat dilakukan perbaikan melalui strategi – strategi yang lebih baik.

Memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Triwulan I Tahun 2024 ini disusun dengan sistematika penulisan dengan bagan sebagai berikut :





BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

2. PERENCANAAN KINERJA

Peningkatan kualitas sistem akuntabilitas selalu menjadi perhatian utama setiap perangkat daerah, termasuk Badan Pendapatan Daerah. Peningkatan ini terlihat dari penajaman program pada Renstra 2021 – 2026.

Berdasarkan Renstra Badan Pendapatan Daerah 2021 – 2026, mencakup satu sasaran utama yaitu Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah dengan Indikator Persentase Penerimaan Pendapatan Daerah sasaran pendukung yaitu Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah.

A. TARGET KINERJA TAHUN 2021 – 2026

Penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Luwu Tfungsi tersebut imur. Hal ini merupakan upaya untuk mengefektifkan dan mengarahkan sumber daya Badan Pendapatan Daerah dalam mewujudkan peran Badan Pendapatan Daerah sebagai pelaku utama dalam penanggulangan bencana dan membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang keuangan. Dalam melaksanakan tugas, Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan tiga fungsi utama yaitu Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah, bidang pengelolaan pendapatan daerah dan bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Fungsi tersebut diformulasikan ke dalam tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah dalam rangka mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah dalam RPJMD 2021 – 2026. Visi yaitu keadaan umum yang diinginkan pada akhir tahun 2026 atau setelahnya dan misi atau rumusan umum tentang upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, strategi atau program – program indikatif untuk mencapai visi dan misi.

1. Pernyataan Visi

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang, dengan kata lain visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.

"Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya"

2. Pernyataan Misi

Misi adalah segala sesuatu (strategi, tindakan) yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi. Misi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur yaitu

MISI Ke-4 RPJMD

"Menciptakan Kepemerintahan dan Pelayanan Publik yang Lebih Baik"

Sasaran 9 RPJMD

"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik"

3. Indikator Kinerja Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, triwulan atau bulanan. Sasaran yang efektif harus memenuhi kriteria spesifik dan dapat terukur. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Adapun hubungan antara tujuan, sasaran, Indikator Kinerja Tujuan dan Target Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026 yang tertuang dalam RENSTRA yang berkaitan dengan Visi dan Misi yang diemban oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.

Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran dan target kinerja sasaran RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Indikator Tujuan dan Sasaran					Kondisi Akhir Renstra
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Memperkuat Pendanaan Sumber – Sumber Belanja Daerah		Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Rasio PAD dibanding Pendapatan Daerah	%	21,32	23,11	23,93	26,07	26,55	27,73	27,73
		Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah	Persentase Penerimaan Pendapatan Daerah	%	95,00	95,00	95,20	95,40	95,60	95,80	95,80

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Pengukuran pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra dilakukan melalui pengukuran pencapaian sasaran kegiatan dalam hal ini melalui pengukuran indikator kinerja kegiatan. Untuk menguatkan pencapaian sasaran strategis, di Tahun 2024 disusun perjanjian kinerja sebagai dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu, dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran kegiatan, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Target kinerja yang ada dalam perjanjian menunjukkan komitmen dari



pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran sesuai indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 yang merupakan kesanggupan untuk melaksanakan kinerja, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target 2023
1	Meningkatnya Penerimaan pendapatan daerah	Persentase Penerimaan Pendapatan Daerah	95,40 %
		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	26,07 %
2	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Nilai LAKIP Hasil Evaluasi Inspektorat	70,00

Penetapan kinerja dengan sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 didukung dengan

pembiayaan APBD Kabupaten Luwu Timur sebesar Rp. 19.547.645.050,00 (*Sembilan Belas Milyar Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Puluh Rupiah*) terdiri dari belanja Operasi Rp. 18.112.475.050,00 dan Belanja Modal Rp. 1.345.170.000,00.

Adapun program dan anggaran secara lengkap disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.
Program dan Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2024

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET.
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.161.179.050,00	APBD
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.296.466.000,00	APBD
	JUMLAH	19.547.645.050,00	

BAB

3

AKUNTABILITAS KINERJA



III. AKUNTABILITAS KINERJA



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dikatakan mampu mengkomunikasikan capaian kinerja unit kerja secara jujur, objektif, akurat dan transparan dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, apabila dalam penyajiannya memenuhi prinsip – prinsip dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu **pertama**, Prinsip Lingkup Pertanggungjawaban, yang mengandung pengertian bahwa hal – hal yang dilaporkan harus proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggungjawab masing – masing dan memuat baik mengenai kegagalan maupun keberhasilan, **kedua**, Prinsip Prioritas, yang mengandung pengertian bahwa yang dilaporkan adalah hal – hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban instansi yang diperlukan untuk upaya – upaya tindak lanjutnya, **ketiga**, Prinsip Manfaat, yang mengandung pengertian bahwa manfaat laporan harus lebih besar daripada biaya penyusunannya dan laporan harus mempunyai manfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja.

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak – pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur melaksanakan kewajiban dengan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran capaian kinerja Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 digunakan untuk mengetahui keberhasilannya dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja sasaran, yang dirumuskan dalam Rencana strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026. Sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024.

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

a. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2024 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang telah disepakati bersama, dalam hal ini antara Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur dengan Bupati Luwu Timur. Tingkat akuntabilitas kinerja instansi diukur dari setiap komponen yang ada dengan kategori sebagai berikut

Tabel. 4
Tingkat Akuntabilitas Kinerja

No	Kategori	Nilai Angka	Interprestasi
1	AA	>90	Sangat memuaskan
2	A	>80-90	Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel
3	BB	>70-80	Sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
4	B	>60-70	Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
5	CC	>50-60	Cukup (memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup memadai, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban
6	C	>30-50	Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tak perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7	D	0-30	Sangat kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu perbaikan yang sangat mendasar

Adapun capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun Triwulan I Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel. 5
Pengukuran Capaian Kinerja

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI Triwulan I 2024	CAPAIAN (%)	NOTIFIKASI
1	Meningkatnya Penerimaan pendapatan daerah	Persentase Penerimaan Pendapatan Daerah	95,40 %	15,95 %	16,72%	●
		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	26,07 %	18,41 %	70,63 %	●

Keterangan : ● Mencapai/Melampaui Target Triwulan I yaitu 15 %

● Belum Mencapai Target

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian sasaran strategis dan sasaran program. Dalam menyimpulkan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan mengukur dan menganalisa capaian indikator *outcome*. Analisis sasaran program juga dilakukan sebagai pendukung capaian kinerja sasaran strategis yang dilakukan terhadap indikator kinerja utama. Analisis juga dilakukan terhadap indikator kinerja yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja, namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran program. Analisis efisiensi penggunaan input berupa sumber daya keuangan dan manusia dilakukan terhadap tiap indikator kinerja dengan cara membandingkan capaian indikator kinerja dengan capaian penggunaan sumber daya. Efisiensi sumber daya terjadi manakala capaian indikator kinerja lebih tinggi dari pada capaian penggunaan sumber daya. Analisis efisiensi dilakukan secara terpisah antara sumber daya keuangan dan sumber daya manusia.

Sasaran Strategis :
Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah

Indikator Kinerja Utama :
1. Persentase Penerimaan Pendapatan Daerah
2. Persentase PAD terhadap pendapatan Daerah

Capaian Kinerja Sasaran Strategis IKU 1 Triwulan I Tahun 2024

IKU 1 Persentase Penerimaan Pendapatan Daerah

1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2024

Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}}{\text{Target Pendapatan Daerah}} \times 100$$

$$\frac{\text{Rp. 304.760.280.499,00}}{\text{Rp. 1.910.663.329.895,00}} \times 100 = 15,95$$

TARGET IKU 1	REALISASI	CAPAIAN
95,40 %	15,95 %	16,72 %



Grafik. 3
Capaian Kinerja Sasaran Strategis IKU 1 Triwulan I Tahun 2024

Tabel 6
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran ke – 1

Sasaran	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah		
Indikator Kinerja Sasaran	Triwulan I Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Penerimaan Pendapatan Daerah	95,40 %	15,95 %	16,72 %

Sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2024, kinerja penerimaan Pendapatan dari sektor Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur masih diatas target yang ditetapkan yaitu 15 %. Dapat dijelaskan bahwa untuk IKU 1 terealisasi sebesar 15,95 % berdasarkan target setahun yaitu 95,40 %, maka capaian kinerja sebesar 16,72 % dari target yang ditetapkan pada Tahun 2024 sebesar 95,40 %. Jika dibandingkan dengan target pada triwulan I Tahun 2024 yaitu sebesar 15 %, maka capaian kinerja melampaui target yang ditetapkan pada triwulan I sehingga capaian kinerja (performance gap) masuk dalam kategori baik.

Analisa ini menunjukkan seberapa besar bagian pendapatan daerah dari total pendapatan yang ada. Analisis ini memberikan gambaran tentang kemandirian finansial dan diversifikasi sumber pendapatan daerah.

Tabel 7
Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Triwulan I Tahun Anggaran 2024

URAIAN	TARGET P-APBD	REALISASI
PENDAPATAN	1.910.663.329.895,00	304.760.280.499,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	391.302.390.695,00	56.112.513.942,00
Pendapatan Pajak Daerah	207.090.490.085,00	35.677.750.875,00
Hasil Retribusi Daerah	8.629.471.620,00	257.058.808,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan	48.391.000.000,00	0.00

Daerah Yang Dipisahkan		
Lain – Lain Pendapatan Asli	127.191.428.990,00	20.177.704.259,00
Daerah Yang Sah		
PENDAPATAN TRANSFER	1.466.477.122.000,00	248.196.000.527,00
Dana Perimbangan	1.067.419.166.000,00	207.478.084.800,00
Dana Insentif Daerah (DID)	15.230.394.000,00	0,00
Dana Desa	109.966.378.000,00	0,00
Pendapatan Bagi Hasil	261.361.184.000,00	40.717.915.727,00
Bantuan Keuangan	12.500.000.000,00	0,00
LAIN – LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	52.883.817.200,00	52.432.051.170,00
Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi	47.904.000.000,00	0,00
Swasta Dalam Negeri Lainnya		
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	2.559.059.000,00	0,00
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan	2.420.758.200,00	451.766.030,00
JUMLAH	1.910.663.329.895,00	304.760.280.499,00

1.2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 8
Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

SASARAN	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah								
INDIKATOR KINERJA	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Triwulan I Tahun 2024		Target Tahun 2026
	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	
Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah	103,42 %	108,86 %	107,16 %	112,80 %	100,10 %	105,15 %	15,95 %	16,72 %	95,80 %

1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 dengan Target Akhir Jangka Menengah

Berdasarkan realisasi Triwulan I Tahun 2024 jika dibandingkan dengan target yang direncanakan sampai dengan tahun 2026, belum dapat diukur ketercapaiannya. Hal ini disebabkan karena realisasi Triwulan I Tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan target akhir jangka menengah sehingga capaiannya baru dapat dibandingkan pada akhir tahun anggaran berjalan.. Adapun perbandingan antara target dan capaian Triwulan I Tahun 2024 dengan target jangka menengah pada Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur 2021 – 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 9
Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 dengan Target Akhir Jangka Menengah (2021-2026)

Sasaran	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah		
Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Triwulan I Tahun 2024	Target Akhir Rensra 2026	% Capaian s/d Triwulan I 2024 terhadap target akhir Renstra 2026
Persentase Penerimaan Pendapatan Daerah	15,95%	95,80 %	16,65 %

1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Standar Nasional (Propinsi)

Adapun perbandingan target Pendapatan Daerah untuk Standar Nasional tidak ada, sehingga yang dapat disajikan yaitu perbandingan dengan pendapatan daerah Skala Propinsi dalam hal ini gambaran/informasi terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah pada wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Target dan realisasi penerimaan pendapatan daerah kabupaten/kota se-Sulawesi selatan Tahun anggaran 2021 yang memuat diantaranya Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berdasarkan Data Target dan Realisasi Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota se-Sulawesi

Selatan Tahun Anggaran 2021, secara keseluruhan tercapai sebesar Rp. 32.204.839.835.820,50 atau 95,54% dari target sebesar Rp. 33.708.541.734.573,20. Pada Tahun Anggaran 2021, hanya ada 2 Kabupaten yang dimana target dan Realisasi Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) nya mencapai dan melebihi target yang diajukan, yakni Kabupaten Luwu Timur sebesar 103,44 % dari target dan Kabupaten Barru sebesar 100,28 % dari target.

Tabel 10
Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2021
Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan

No	Kabupaten/Kota	Target dan Realisasi dalam persen	Keterangan
1	Makassar	10,20 %	
2	Bone	7,15 %	
3	Gowa	5,54 %	
4	Luwu Timur	4,81 %	Urutan ke – 4 tertinggi
5	Wajo	4,56 %	
6	Luwu	4,36 %	
7	Bulukumba	4,25 %	
8	Maros	4,25 %	
9	Pangkep	4,10 %	
10	Luwu Utara	4,08 %	
11	Pinrang	3,95 %	
12	Soppeng	3,76 %	
13	Jeneponto	3,74 %	
14	Sidrap	3,73 %	
14	Sinjai	3,73 %	
16	Takalar	3,41 %	
17	Tana Toraja	3,30 %	
18	Enrekang	3,21 %	
19	Kepulauan Selayar	3,19 %	
20	Toraja Utara	3,15 %	
21	Bantaeng	3,03 %	
22	Barru	2,93 %	
23	Palopo	2,91 %	
24	Pare - Pare	2,67 %	

Berdasarkan analisis perbandingan Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan yakni 24 Kabupaten/Kota, Kabupaten Luwu Timur berada pada urutan ke-4 Pendapatan Daerah tertinggi setelah Kota Makassar, Kabupaten Bone dan Kabupaten Gowa. Penerimaan Pendapatan Kabupaten Luwu Timur telah melampaui 20 Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Selatan.

1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Ada beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian indikator sasaran tersebut yaitu :

1. Pembentukan Tim Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Pembentukan Tim TP2DD Kabupaten Luwu Timur
2. Mengidentifikasi seluruh potensi pendapatan baik secara Intensifikasi dan Ekstensifikasi
3. Harmonisasi dan revisi kebijakan, melakukan percepatan proses revisi peraturan yang belum harmonis dan mengalami perubahan khususnya pajak dan retribusi daerah
4. Efektifitas kebijakan pendapatan, meninjau kebijakan pajak, tarif dan sumber pendapatan lainnya, mengevaluasi apakah kebijakan tersebut telah diterapkan dengan efektif dan memberikan kontribusi yang diharapkan
5. Efektivitas Administrasi Pajak
6. Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan pendapatan daerah, sistem informasi pajak yang canggih dapat membantu dalam pengumpulan data yang akurat dan analisis yang lebih baik
7. Kepatuhan Pajak, meninjau tingkat kepatuhan pajak masyarakat dan pengusaha
8. Evaluasi Pendapatan yang dilakukan secara berkala terhadap keberhasilan implementasi solusi yang telah diambil dan mengidentifikasi area – area yang masih memerlukan perbaikan dan terus mencari inovasi untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah

Beberapa hal yang mempengaruhi kegagalan dalam pencapaian indikator sasaran tersebut yaitu :

1. Kebijakan pajak yang tidak efektif dapat menghambat pertumbuhan pendapatan daerah
2. Kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan sektor swasta dapat menghambat upaya peningkatan pendapatan daerah

Beberapa alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian indikator tersebut antara lain :

1. Memperkuat kerja sama antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk mengidentifikasi peluang baru dan meningkatkan koordinasi dalam pengelolaan pendapatan daerah
2. Melakukan program penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat tentang pentingnya pembayaran pajak serta penggunaan dana pajak untuk pembangunan daerah
3. Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan administrasi pajak dan pemantauan pendapatan daerah
4. Meninjau ulang dan memperbaharui kebijakan pajak yang ada untuk mengakomodasi perubahan ekonomi dan memperkuat struktur pendapatan

1.6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dapat dijelaskan bahwa gambaran realisasi kinerja Tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena Badan Pendapatan Daerah telah melakukan berbagai upaya melalui program kerja dan tahapan/aktivitas dalam rangka mengoptimalkan peningkatan penerimaan pendapatan daerah Tahun 2023 antara lain :

NO	PROGRAM KERJA	TAHAPAN/AKTIVITAS
1	Pembentukan Tim Optimalisasi Pendapatan Daerah dengan melibatkan seluruh OPD pengelola pendapatan	Melakukan koordinasi dan monitoring serta evaluasi secara kontinyu
	Pembentukan Tim TP2DD Kab. Luwu Timur	Melakukan sosialisasi, edukasi dan monitoring terkait pelaksanaan ETPD kepada masyarakat dan aparat pemerintah daerah
2	Penggalian seluruh potensi pendapatan daerah baik secara intensifikasi dan ekstensifikasi	Rapat koordinasi internal Bapenda
		Mengundang dan melakukan rapat terhadap pihak – pihak yang diasumsikan berpotensi adanya penerimaan pendapatan

3	Harminisasi dan revisi kebijakan	Melakukan percepatan proses revisi peraturan yang belum harmonis dan mengalami perubahan khususnya pajak dan retribusi daerah
		Melakukan rapat koordinasi dengan seluruh OPD pengelola pendapatan (Perda/Perbup)
5	Penguatan Pengawasan	Melakukan rapat koordinasi bersama OPD terkait
		Aktif mengikuti monitoring per triwulan melalui MCP KPK RI
6	Evaluasi Pendapatan	Melakukan rapat evaluasi pendapatan bersama seluruh OPD pengelola pendapatan

- **Program dan kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah yaitu :**

√ Program Pengelolaan Pendapatan Daerah :

- Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah :
 1. Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
 2. Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah
 3. Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijak Pajak Daerah
 4. Sub Kegiatan Pendataan Dan Pendaftaran Objek pajak Daerah
 5. Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
 6. Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah
 7. Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
 8. Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
 9. Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah

1.7. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel. 12
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		T	R	CAPAIAN	T	R	CAPAIAN
Meningkatnya Penerimaan pendapatan daerah	Persentase Penerimaan Pendapatan Daerah	95,40 %	15,95 %	16,65 %	3.296.466.000	157.697.928	4,78 %
JUMLAH					3.296.466.000	157.697.928	4,78

Tabel. 13
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

N o	Sasaran strategis	Indikator kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Penerimaan pendapatan daerah	Persentase Penerimaan Pendapatan Daerah	16,65%	4,78%	95,22%
	CAPAIAN		16,65 %		

Pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah sebesar 16,65 % dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 4,78 %, sehingga persentase efisiensi adalah 95,22 %. Adapun Persentase efisiensi biaya dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100 \% - \left[\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100 \% \right]$$

Capaian Kinerja Sasaran Strategis IKU 2 Triwulan I Tahun 2024

IKU 2 Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah

1.2. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2024

Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100$$

$$\frac{\text{Rp. 56.112.513.942}}{\text{Rp. 304.760.280.499}} \times 100 = 18,41$$

TARGET IKU 2	REALISASI	CAPAIAN
26,07 %	18,41 %	70,63 %



Grafik. 4

Capaian Kinerja Sasaran Strategis IKU 2 Triwulan I Tahun 2024

Tabel 14
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran ke – 2

Sasaran	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah		
Indikator Kinerja Sasaran	Triwulan I Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	26,07 %	18,41 %	70,63 %

Sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2024, kinerja penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain – Lain PAD yang sah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur masih dibawah target yang ditetapkan. Dapat dijelaskan bahwa untuk IKU 2 terealisasi sebesar 18,41 % berdasarkan target setahun yaitu 26,07 % maka capaian kinerja sebesar 70,63 %. Dari target yang ditetapkan pada Tahun 2024 sebesar 26,07 %, secara keseluruhan dapat diukur ketercapaiannya setelah tahun anggaran berjalan berakhir. Sehingga jika melihat capaian sampai dengan Triwulan I Tahun 2024, maka ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur pada Dana Transfer dari Pemerintah Pusat masih tergolong tinggi, sehingga diharapkan kedepannya dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah sesuai dengan potensi yang ada, sehingga pelaksanaan otonomi daerah dapat terwujud secara efektif dan efisien.

Berikut Kami sajikan Tabel perbandingan Target dan Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Triwulan I Tahun Anggaran 2024.

Tabel 15
Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
Triwulan I Tahun Anggaran 2024

URAIAN	TARGET APBD	REALISASI
PENDAPATAN ASLI DAERAH	391.302.390.695,00	56.112.513.942,00
Pendapatan Pajak Daerah	207.090.490.085,00	35.677.750.875,00
Hasil Retribusi Daerah	8.629.471.620,00	257.058.808,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	48.391.000.000,00	0.00
Lain – Lain PAD yang Sah	127.191.428.990,00	20.177.704.259,00
JUMLAH	391.302.390.695,00	56.112.513.942,00

2.2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Triwulan I 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 16
Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

SASARAN	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah								
INDIKATOR KINERJA	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Triwulan I Tahun 2024		Target Tahun 2026
	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	
Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	19,74 %	92,60 %	19,70 %	85,23 %	22,21 %	92,81 %	18,41 %	70,63 %	27,73 %

3.2. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 dengan Target Akhir Jangka Menengah

Berdasarkan realisasi Triwulan I Tahun 2024 jika dibandingkan dengan target yang direncanakan sampai dengan tahun 2026, belum mencapai target yang ditetapkan karena secara keseluruhan gambaran capaian dapat diukur setelah berakhirnya tahun berjalan. Adapun perbandingan antara target dan capaian

Triwulan I Tahun 2024 dengan target jangka menengah pada Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur 2021 – 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 17
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 terhadap
Target Jangka Menengah
(2021-2026)

Sasaran	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah		
Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Triwulan I Tahun 2024	Target Akhir Rensra 2026	% Capaian s/d Triwulan I Tahun 2024 terhadap target akhir Renstra 2026
Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	18,41 %	27,73 %	66,39 %

4.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Standar Nasional (Provinsi)

Adapun perbandingan target Pendapatan Daerah untuk Standar Nasional tidak ada, sehingga yang dapat disajikan yaitu perbandingan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Skala Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini gambaran/informasi terkait dengan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah pada wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Target dan realisasi penerimaan pendapatan daerah kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan Tahun anggaran 2021 yang memuat diantaranya Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Berdasarkan Data Target dan Realisasi Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021, untuk Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi se-Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Luwu Timur berada pada urutan kedua setelah Kota Makassar.

Tabel 18
Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021
Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan

No	Kabupaten/Kota	Target dan Realisasi dalam persen	Keterangan
1	Makassar	26,21 %	
2	Luwu Timur	7,28 %	Urutan ke – 2 tertinggi
3	Pangkep	5,85 %	
4	Gowa	5,79 %	
5	Maros	4,99 %	
6	Pare – Pare	3,67 %	
7	Soppeng	3,49 %	
8	Wajo	3,38 %	
9	Bone	3,23 %	
10	Bulukumba	3,18 %	
11	Palopo	3,16 %	
12	Sidrap	3,08 %	
13	Pinrang	3,02 %	
14	Luwu	2,98 %	
14	Bantaeng	2,76 %	
16	Luwu Utara	2,75 %	
17	Takalar	2,74 %	
18	Jeneponto	2,23 %	
19	Sinjai	2,15 %	
20	Barru	2,08 %	
21	Tana Toraja	1,98 %	
22	Enrekang	1,69 %	
23	Kepulauan Selayar	1,24 %	
24	Toraja Utara	1,05 %	

Berdasarkan analisis perbandingan Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan yakni 24 Kabupaten/Kota, Kabupaten Luwu Timur berada pada urutan ke-2 Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi setelah Kota Makassar,. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Luwu Timur telah melampaui 22 Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Selatan.

1.2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian indikator sasaran tersebut yaitu :

1. Tersedianya beberapa Inovasi dalam rangka pencapaian penerimaan pendapatan daerah untuk mengidentifikasi lost penerimaan pendapatan daerah di Kabupaten Luwu Timur diantaranya :
 - LAKELLING (Layanan Keliling)
Bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah yang terfokus di pelayanan dan percepatan pembayaran pajak
 - SARTIKA (Satu Qris Satu Unit Kerja)
Bertujuan untuk menekan pembayaran tunai ke non tunai, meminimalisir lost penerimaan pendapatan di sektor perangkat daerah/unit kerja dalam pengelolaan pendapatan, mewujudkan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Kabupaten Luwu Timur khususnya penggunaan QRIS yang merupakan program nasional
 - SI OCA (Sistem Informasi One Click Away)
Sebagai Reminder/pengingat otomatis terkait pelaporan pajak untuk meningkatkan pelaporan dan pembayaran pajak tepat waktu, memberikan informasi yang berkaitan tentang pajak secara on line dengan sasaran para wajib daerah Kabupaten Luwu Timur
 - SIPAKATAU (Sistem Pajak Daerah Terpadu)
Meningkatkan pelayanan publik atau masyarakat dalam hal pengadministrasian pajak daerah secara on line
 - Pembayaran PBB-P2 secara E-Commerce
Mengoptimalkan pembayaran PBB-P2 melalui kemudahan pelayanan pembayaran berbasis digital melalui :
 - Ovo
 - Shopee

2. Pemutakhiran data wajib pajak (data lama dan data baru)
3. Penguatan pengawasan dengan melakukan uji potensi/petik terhadap restoran dan hotel yang terpasang alat transaksi system online (MPOS), pengawasan langsung dimulut tambang dalam rangka mengidentifikasi pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dan penertiban terhadap reklame yang tidak patuh dalam memenuhi kewajibannya
4. Pengembangan Sistem Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui sosialisasi dan edukasi pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah secara non tunai dengan menggunakan qanal QRIS, pemberian alternatif pembayaran dan optimalisasi pajak daerah dengan menggunakan QRIS, penginputan data update wajib pajak ke Aplikasi SIMPADA untuk mengelola data penerimaan pajak secara real time dan sosialisasi Pelayanan Keliling (LAKELING) di setiap Kecamatan

Beberapa hal yang mempengaruhi kegagalan dalam pencapaian indikator sasaran tersebut yaitu :

1. Pajak Hotel
 - Potensi :
Banyaknya pekerja yang berkunjung ke wilayah Soroako khususnya Kontraktor Nasional yang bermitra dengan PT. Vale Indonesia, Tbk sehingga hal ini dapat meningkatkan hunian hotel tamu.
 - Masalah/Kendala :
PT. Vale Indonesia, Tbk memfasilitasi Karyawan mitra kerjanya untuk menginap di Dormitory, Apartemen, Guest House dan Perumahan Milik PT. Vale Indonesia, Tbk sehingga hal ini mempengaruhi jumlah tamu yang masuk hotel.
2. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
 - Potensi :
 - o Penggunaan material MBLB (Batu, Pasir dan Kerikil) pada proyek-proyek infrastruktur PT. Vale Indonesia, Tbk yang dilakukan oleh kontraktor mitra kerjanya
 - o Penggunaan material MBLB pada proyek pembangunan infrastruktur milik swasta (Perumahan, Hotel, Ruko dan Fasilitas lainnya)

- Masalah/Kendala :
 - o Material MBLB yang digunakan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur tersebut tanpa ada pembayaran pajak ke daerah.
 - o Beberapa perusahaan tambang yang beroperasi disinyalir tidak ada pemasukan pajak terhadap daerah
- 3. Pajak Restoran
 - Potensi :
 - o Penyedia layanan Catering pada perusahaan kontraktor nasional dan lokal yang bermitra dengan PT. Vale Indonesia, Tbk
 - o Penyedia layanan catering di luar area PT. Vale (PT. CLM, PT.Mars, Perusahaan Kelapa Sawit)
 - o Rumah makan dan Resto khususnya yang berada di wilayah Pujasera
 - o Rumah Makan penggunaan MPOS
 - Masalah/Kendala :
 - o Sebagian belum terdata dan terdaftar sebagai objek penerimaan pajak restoran;
 - o Belum ada pembayaran pajak atas penyediaan layanan catering tersebut;
 - o Belum terdata
 - o Sebagian besar pengguna MPOS tidak mengoptimalkan pemakaian alat (alat diaktifkan tetapi tidak dioperasikan secara baik)
- 4. Pajak Penerangan Jalan (PPJ)
 - Potensi :
 - o Penggunaan daya listrik $\pm 2,7$ MW secara gratis oleh masyarakat dan pengusaha di Dusun Tapoundau Desa Sorowako Kec. Nuha Penyedia layanan catering di luar area PT. Vale (PT. CLM, PT.Mars, Perusahaan Kelapa Sawit)
 - Masalah/Kendala :
 - o Masyarakat tang berdomisili di Dusun Tapuondau menginginkan pemasangan meteran listrik secara gratis
- 5. Pajak Reklame
 - Potensi :

- o Reklame milik pribadi non produk rokok yang diatur di Perda
 - o Reklame BRI Link
 - Masalah/Kendala :
 - o Masih ada sebagian pemilik reklame yang tidak melaporkan kewajibannya
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
- Potensi :
 - o Kenaikan NJOP setiap 3 tahun
 - o Penyesuaian Tarif
 - o Pendataan Objek Pajak Baru
 - Masalah/Kendala :
 - o Informasi harga tanah riil sebagai acuan dan pendekatan penetapan ZNT yang sulit didapatkan
 - o Penyesuaian tarif harus melalui Perda
7. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- Potensi :
 - o Kenaikan NJOP berimplikasi pada BPHTB terutang
 - Masalah/Kendala :
 - o Sebagian masyarakat masih belum bisa menerima atas perubahan kenaikan NJOP
 - o Sulitnya mendapatkan informasi harga jual beli tanah/harga pasar wajar per zona atau desa
8. Pajak Air Tanah
- Potensi :
 - o Penggunaan air bawah tanah oleh usaha pribadi maupun perusahaan
 - Masalah/Kendala :
 - o Sebagian WP belum mengoptimalkan penggunaan Meteran Air yang digunakan untuk menghitung volume pemakaian air bawah tanah
9. Hibah Listrik
- Potensi :
 - o Tarif listrik masih menggunakan tarif tahun 2023 sebesar Rp. 607,45/kwh
 - Masalah/Kendala :

- o Sudah pernah dilakukan rapat dengan PT. PLN namun belum ada hasil yang maksimal;
- o Diharapkan dukungan PT. Vale Indonesia, Tbk untuk peningkatan tarif listrik tersebut

Beberapa alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian indikator tersebut antara lain :

1. - Diharapkan PT. Vale, Tbk tidak lagi memfasilitasi karyawan mitra kerjanya untuk menginap di Dormitory, Apartemen Guest House dan perumahan milik PT. Vale Indonesia, Tbk
 - Untuk memberdayakan sektor usaha perhotelan, khususnya wilayah pemberdayaan PT. Vale Indonesia, Tbk diharapkan Pt. Vale Indonesia, Tbk agar semua tamu mitra kerjanya untuk diarahkan menginap di hotel – hotel yang ada di wilayah Soroako atau sekitarnya
2. - Diharapkan PT. Vale Indonesia, Tbk memfasilitasi untuk tidak mencairkan invoice sebelum ada bukti lunas bayar pajak;
 - Diharapkan Pt. Vale Indonesia, Tbk memfasilitasi Pemda untuk membuka RAB untuk, menghitung material MBLB setelah kontrak ditandatangani tanpa Pemda membawa keluar dokumen RAB
 - Perlunya pengawasan di mulut tambang (portal), untuk mengidentifikasi transaksi penggunaan/pembelian material
3. - Diharapkan kepada Kontraktor Mitra Kerja PT. Vale Indonesia, Tbk untuk mempersyaratkan kepada pengusaha penyedia layanan catering untuk melampirkan bukti lunas pajak daerah
 - Perlunya pendataan secara serempak dan mengkomunikasikan kepada pengelola pugasera dimaksud
 - Perlunya pendataan dan pertemuan untuk menyamakan persepsi terkait kewajiban pajak daerah
4. - Jika dimungkinkan PT. Vale Indonesia, Tbk memfasilitasi subsidi biaya pemasangan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan menggunakan CSR di wilayah tersebut
 - Perlunya duduk bersama antara Pemda, PT. Vale dan Masyarakat dalam rangka mencari solusi terkait permasalahan ini

5. - Perlunya pendataan secara serempak
 - Penyuluhan untuk memberikan pemahaman kepada wajib pajak reklame terkait kewajibannya
6. - Pemutakhiran ZNT yang relevan dengan harga pasar akan berimplikasi pada kenaikan NJOP PBB-P2
 - Penyesuaian tarif hingga maksimal 0,3 % (0,5 % UU HKPD) dapat menai
7. Dengan adanya kenaikan NJOP yang sesuai dengan harga pasar wajar, maka memungkinkan untuk menetapkan BPHTB untuk perolehan hak karena hibah, waris dll yang nilainya mengacu pada NJOP
8. Perlunya pengawasan dalam hal pemakaian meteran air yang telah dipasang
9. - Tarif listrik tersebut perlu ditinjau kembali mengingat sudah digunakan lebih dari 9 tahun;
 - Jika PT. PLN mampu menyediakan tenaga listrik ke seluruh wilayah Luwu Timur, maka sebaiknya digunakan langsung oleh PT. Vale Indonesia, tbk

6.2. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dapat dijelaskan bahwa gambaran realisasi kinerja Triwulan I Tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena Badan Pendapatan Daerah telah melakukan berbagai upaya dalam rangka optimalisasi mengoptimalkan peningkatan penerimaan dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2024 antara lain :

NO	PROGRAM KERJA	TAHAPAN/AKTIVITAS
1	Penggalian seluruh potensi pendapatan daerah baik secara intensifikasi dan ekstensifikasi	Berkoordinasi dengan pihak – pihak terkait dalam rangka mengidentifikasi seluruh layanan catering, pertambangan, reklame dan layanan penginapan yang ada di perusahaan nasional maupun lokal
		Aktif melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada seluruh wajib pajak dan wajib retribusi yang telah terdaftar secara door to door

2	Pemutakhiran data wajib pajak (data lama dan baru)	Melakukan pendataan secara langsung ke lapangan terhadap seluruh objek pajak yang sudah terdaftar maupun yang belum
3	Penguatan Pengawasan	Melakukan uji potensi/petik terhadap restoran dan hotel yang potesnsial, khususnya yang terpasang alat transaksi system online (MPOS)
		Penertiban terhadap reklame yang tidak patuh dalam memenuhi kewajibannya dengan melibatkan bidang dan OPD yang terkait
4	Pengembangan Sistem Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Sosialisasi dan edukasi pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah secara non tunai dengan menggunakan kanal QRIS kepada OPD Desa, Sekolah dan Pelaku Usaha
		Pemberian alternatif pembayaran dan optimalisasi pajak daerah dengan menggunakan kanal QRIS
		Melakukan sosialisasi dan edukasi Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah (SIMPADA)
		Penginputan data up date wajib pajak ke Aplikasi SIMPADA untuk mengelola data penerimaan pajak secara real time
5	Evaluasi Pendapatan	Melakukan Evaluasi Penerimaan Pendapatan khususnya Pajak Daerah setiap bulan bersama seluruh pejabat dan staf Badan Pendapatan Daerah
		Pemberian Reward kepada wajib pajak berprestasi

- **Program dan kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Daerah yaitu :**

√ Program Pengelolaan Pendapatan Daerah :

- Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah :
 1. Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
 2. Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah
 3. Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
 4. Sub Kegiatan Pendataan Dan Pendaftaran Objek pajak Daerah
 5. Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
 6. Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah
 7. Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
 8. Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
 9. Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah

7.2. Analisis atas Penggunaan Sumber Daya

Tabel. 19
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		T	R	CAPAIAN	T	R	CAPAIAN
Meningkatnya Penerimaan pendapatan daerah	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	26,07 %	18,41 %	70,63 %	3.296.466.000	157.697.928	4,78 %
JUMLAH					3.296.466.000	157.697.928	4,78
TOTAL BELANJA					19.457.645.050	5.466.477.541	28,09

Tabel. 20
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

N o	Sasaran strategis	Indikator kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Penerimaan pendapatan daerah	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	70,63%	4,78%	95,22%

Pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah sebesar 70,63 % dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 4,78 %, sehingga persentase efisiensi adalah 95,22 %. Adapun Persentase efisiensi biaya dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100 \% - \left[\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100 \% \right]$$

Dengan keterbatasan sumber daya sarana, prasarana dan tenaga dalam menyampaikan informasi maupun pengetahuan tentang pendapatan daerah, maka dapat terfasilitasi dengan penggunaan aplikasi QRIS QR Code standar pembayaran Nasional dimanapun pengguna pajak bisa langsung transaksi, adanya papan himbauan atau baliho yang ditempatkan pada beberapa kecamatan dan pemasangan banner di setiap lokasi objek pajak sehingga dengan sendirinya masyarakat dapat langsung melihat informasi terkait pendapatan daerah. Dan penyebarluasan informasi terkait pendapatan baik itu pajak maupun retribusi juga dilakukan melalui Media Sosial melalui FB Bapenda Lutim, IG @bapenda lutim dan email.

Sumber daya yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur baik sumber daya manusia maupun sumber daya peralatan masih belum memadai, namun dengan keterbatasan tersebut, Badan Pendapatan Daerah tetap berupaya untuk bekerja maksimal dalam mengoptimalkan penerimaan

pendapatan daerah. Sumber daya manusia yang ada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur sebanyak 52 orang yang terdiri dari 25 orang PNS, 1 orang PPPK, 23 orang Upah Jasa Tenaga Administrasi, 1 orang Supir, 1 orang Security dan 1 orang Cleaning Service. Dengan membandingkan luas cakupan wilayah pelayanan pendapatan daerah yang tidak sebanding dengan jumlah personil yang ada. Maka dalam pelaksanaan mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur memaksimalkan PNS dan upah jasa tenaga administrasi yang ada untuk berkontribusi dalam sosialisasi dan penagihan di lapangan.

1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Tabel. 21
Capaian indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2024	Realisasi TW I 2024	Capaian (%)
1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan pengelolaan pendapatan	Jumlah dokumen rencana pengelolaan pajak daerah	4 dokumen	1 dokumen	25 %
2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Tersedianya hasil analisa pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah	Jumlah dokumen hasil analisis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah	6 dokumen	3 dokumen	50 %
3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terlaksananya penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	12 laporan	3 laporan	25 %
4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Terlaksananya pendataan dan pendaftaran wajib pajak (Non PBB-P2 dan BPHTB)	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak	12 Laporan	3 laporan	25 %

5	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Terlaksananya onjek pajak yang disesuaikan NJOPnya	Jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOPnya	115.000 objek pajak	0	0
6	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Terlaksananya ketetapan pajak daerah (Non PBB-P2 dan BPHTB)	Jumlah dokumen ketetapan pajak daerah	145 dokumen	25 dokumen	17 %
7	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Terfasilitasinya layanan dan konsultasi pajak daerah	Jumlah layanan dan konsultasi Pajak daerah	24 layanan	6 layanan	25 %
8	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Tersedianya data pelaporan pajak daerah	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	12 Laporan	3 laporan	25 %
9	Penagihan Pajak Daerah	Tercapaiannya penagihan pajak daerah (Non PBB-P2 dan BPHTB)	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	98 dokumen	20 dokumen	20

÷ Program Penunjang Urusan Perangkat Daerah

Adapun kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung program ini sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- 3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah :
 - a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah :
 - a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - b. Sosialisasi Peraturan Perundang – undangan
 - c. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan
- 5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah :
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan
 - f. Fasilitas Kunjungan Tamu
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Pengadaan Mebel
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
 - c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

÷ **Hambatan/Kendala**

Dalam pencapaian sasaran tersebut, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- a. Keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa (e-catalog)
- b. Terdapat sub kegiatan yang sifatnya disediakan, yang penggunaan anggarannya disesuaikan dengan kebutuhan
- c. Keterlambatan proses administrasi keuangan

÷ **Solusi**

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka langkah yang ditempuh adalah :

- a. Melakukan koordinasi pejabat pengadaan dan PPK terkait proses penagdaan barang dan jasa (e-catalog)
- b. Mencermati rekening belanja untuk sub kegiatan yang sifatnya disediakan
- c. Percepatan administrasi pertanggungjawaban keuangan

÷ **Efisiensi Anggaran**

- a. Terdapat jabatan pelaksana yang masih kosong pada lingkup sekretariat, dan untuk mengakomodir semua pelaksanaan tugas, dilakukan rangkai jabatan sebagai pelaksana harian dan memaksimalkan upah jasa dalam membantu pelaksanaan tugas ASN
- b. Memaksimalkan peralatan yang ada dengan melakukan pemeliharaan peralatan kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas ASN

Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung

Tabel. 22
Capaian Indikator Kinerja Program Pendukung

N o	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2024	Realisasi Triwulan I 2024	Capaian (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	29,08 %	29,08 %
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kualitas perencanaan organisasi perangkat daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	100 %	22.50 %	22,50 %
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (dokumen)	2 dokumen	- dokumen	-
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tersusunnya dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen)	2 dokumen	- dokumen	-
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen)	2 dokumen	1 dokumen	50 %
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (laporan)	10 laporan	4 laporan	40 %

2	Kegiatan Adminsitasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib administrasi keuangan	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100 %	46,99 %	46,99 %
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (orang)	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (orang)	29 orang	26 orang	90 %
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD (dokumen)	12 dokumen	3 dokumen	25 %
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan perangkat daerah	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD (laporan)	19 laporan	5 laporan	26 %
4	Kegiatan Adminsitasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kualitas pengelolaan aset	Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar	100 %	25 %	25 %
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunnya laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun (laporan)	4 laporan	1 laporan	25 %
5	Kegiatan Adminsitasi Kepegawaian	Kualitas sumber daya manusia organisasi perangkat daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja	100 %	99 %	99 %

	Perangkat Daerah	dengan rata – rata capaian kinerja	administrasi kepegawaian perangkat daerah			
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Termutakhirnya laporan data administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian (dokumen)	12 dokumen	3 dokumen	25 %
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang - undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang - undangan (orang)	450 orang	- orang	-
3	Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur sipil negara	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis Implementasi peraturan perundang - undangan (orang)	29 orang	1 orang	3 %
6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Persentase rata-rata capaian administrasi umum perangkat daerah	100 %	14,14 %	14,14 %
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang optimal	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)	10 paket	-	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Terseidinya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan (paket)	1 paket	-	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang	18 paket	-	-

			disediakan (paket)			
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (paket)	3 paket	1 paket	33 %
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan (Dokumen)	36 dokumen	9 dokumen	25 %
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan minum tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu (laporan)	4 laporam	4 laporan	25 %
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (laporan)	160 laporan	25 laporan	16 %
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	Persentase barang milik daerah perangkat daerah penunjang yang terpenuhi	100 %	-	-
	Pengadaan Mebel	Terlaksananya pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan (paket)	12 paket	-	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (unit)	31 unit	-	-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana	Jumlah unit sarana dan prasarana	4 unit	-	-

	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	gedung kantor atau bangunan lainnya	gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)			
8	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi perangkat daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	25 %	25 %
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya administrasi surat masuk dan keluar	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	12 laporan	3 laporan	25 %
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (laporan)	12 laporan	3 laporan	25 %
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya jasa tenaga pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)	12 laporan	3 laporan	25 %
9	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kualitas pemeliharaan aset	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100 %	-	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara dan	8 unit	-	-

	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		dibayarkan pajaknya (unit)			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin)	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	34 unit	-	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan/atau bangunan lainnya yang diperlihara/direhabilitasi (unit)	1 unit	-	-

3.3 Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan serta analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Anggaran APBD untuk Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Taimur Tahun 2024 adalah sebesar **Rp.19.457.645.050,-** (*Sembilan Belas Miliar Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Puluh Rupiah*), terdiri dari Belanja Operasi **Rp. 18.112.475.050,-** dan Belanja Modal **Rp. 1.345.170.000,-**. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 2 Program, 9 Kegiatan serta 36 Sub Kegiatan. Adapun target anggaran pada Tahun Anggaran 2023 dan realisasi dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik.5
Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2024

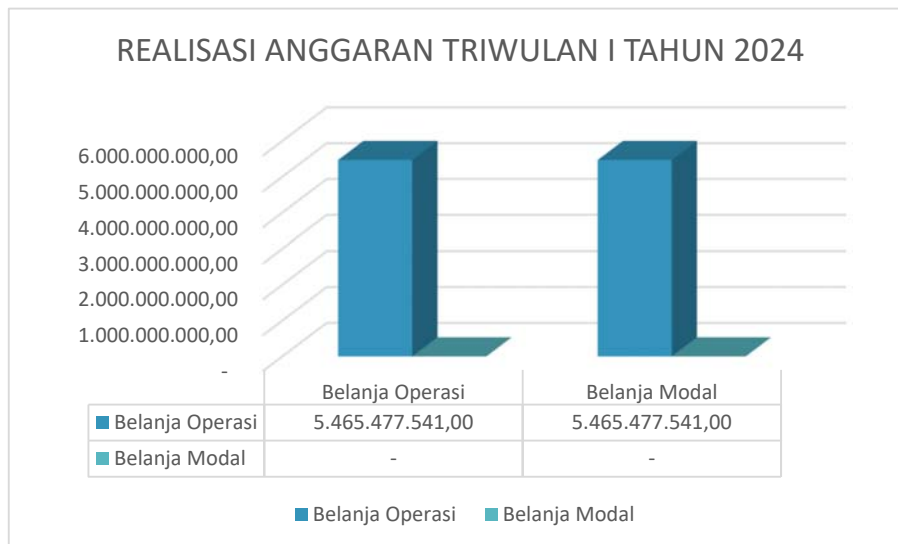


Diagram. 1 Persentase Serapan Anggaran Triwulan I Tahun 2024

Tabel . 20
Realisasi anggaran Berdasarkan Program, Kegiatan dan
Sub Kegiatan Triwulan I Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Lebih/(Kurang)
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.161.179.050	5.307.779.613	32,84	(10.853.399.437)
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	77.779.300	10.870.000	13,98	(66.909.300)
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60.642.000	10.870.000	17,92	(49.772.000)
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.002.000	0	00,00	(3.002.000)
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.000.300	0	00,00	(3.000.300)
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.135.000	0	00,00	(11.135.000)
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.244.464.860	5.173.092.722	39,06	(8.071.372.138)
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.119.913.860	5.164.298.222	39,36	(7.955.615.638)
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	21.377.000	0	00,00	(21.377.000)
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	103.174.000	8.794.500	8,52	(94.379.500)
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.581.000	0	00,00	(13.581.000)
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.581.000	0	00,00	(13.581.000)
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	336.841.000	6.780.000	2,01	(330.061.000)
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	43.306.000	5.120.000	11,82	(38.186.000)
2	Sosialisasi Peraturan Perundang – undangan	54.465.000	0	00,00	(54.465.000)
3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – undangan	239.070.000	1.660.000	0,69	(237.410.000)
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	680.608.370	89.040.305	13,08	(591.568.065)

1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.300.000	0	00,00	(5.300.000)
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.000.000	0	00,00	(2.000.000)
3	Penyediaan Bahan logistik Kantor	7.905.570	1.958.500	24,77	(5.947.070)
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	171.247.000	300.000	0,18	(170.947.000)
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan	3.720.000	1.240.000	33,33	(2.480.000)
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.250.000	2.790.000	24,80	(8.460.000)
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	479.185.800	82.751.805	17,27	(396.433.995)
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.1345.170.000	0	00,00	(50.611.900)
1	Pengadaan Mebel	26.550.000	0	00,00	(26.550.000)
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	454.620.000	0	00,00	(454.620.000)
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	864.000.000	0	00,00	(864.000.000)
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	271.954.520	27.996.586	10,29	(243.957.934)
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	27.154.520	0	00,00	(27.154.520)
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	204.000.000	21.996.586	10,78	(182.003.414)
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	40.800.000	6.000.000	14,71	(34.800.000)
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	190.780.000	0	00,00	(190.780.000)
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	54.920.000	0	00,00	(54.920.000)
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64.860.000	0	00,00	(64.860.000)
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	71.000.000	00	00,00	(71.000.000)

B	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.296.466.000	157.697.928	4,78	(3.138.768.072)
1	Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.296.466.000	157.697.928	4,78	(3.138.768.072)
1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	123.011.000	28.789.415	23,40	(94.221.585)
2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	333.811.000	24.150.498	7,23	(309.660.502)
3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	194.430.000	18.901.005	9,72	(175.528.995)
4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	225.039.600	9.491.500	4,22	(215.548.100)
5	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.037.856.000	24.735.010	2,38	(1.013.120.990)
6	Penetapan Wajib Pajak Daerah	855.484.400	8.000.000	0,94	(847.484.400)
7	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	52.119.000	4.090.000	7,85	(48.029.000)
8	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	146.137.000	16.560.500	11,33	(129.576.500)
9	Penagihan Pajak Daerah	328.578.000	22.980.000	6,99	(305.598.000)
JUMLAH		19.457.645.050	5.465.477.541	28,09	(13.992.167.509)

- **Permasalahan dan Solusi terkait Penyerapan Anggaran**

Tabel. 21
Permasalahan dan Solusi

NO	PROGRAM/KEGIA TAN	PERMASALAHAN TERKAIT PENCAPAIAN KINERJA (SECARA TEKNIS BAIK FAKTOR INTERNAL MAUPUN FAKTOR EKSTERNAL)	PERMASALAHAN TERKAIT REALISASI KEUANGAN	SOLUSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A			
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD			
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
2	Kegiatan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			

	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
3	Kegiatan Adminstrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			
4	Kegiatan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kegiatan ini adalah sosialisasi penjagaan cek point MBLB kepada Penambang belum dilaksanakan/tertunda berhubung peraturan pelaksanaan Perda Nomor 9 Tahun 2023 dalam hal ini Perbub tentang Penyelenggaraan Pajak Daerah masih dalam proses evaluasi di Biro Hukum Prov. Sul-Sel		Kegiatan sosialisasi dilaksanakan setelah Perbub dievaluasi di Biro Hukum Prov Sul-Sel

	Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kegiatan bimtek peningkatan kapasitas Aparatur pengelolaan PAD yang sedianya dilaksanakan di triwulan 1 tertunda berhubung pemateri dari Kemendagri yang akan mengisi materi dalam kegiatan Bimtek tersebut bertepatan dengan jadwal yang telah terschedule di Kementerian		Disarankan untuk dilaksanakan sesuai dengan schedule dengan pihak kemendagri
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
	Fasilitasi Kunjungan Tamu			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan			

	Pemerintah Daerah			
	Pengadaan Mebel	Pengadaan dalam proses e-katalog di ULP		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan dalam proses e-katalog di ULP		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan dalam proses e-katalog di ULP		
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
9	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			
	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah			
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah			
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		Rendahnya capaian realisasi anggaran pada TW 1 yaitu 33,08%, disebabkan oleh pengajuan belanja yang terkendala di proses pengajuan SPJ sebab beberapa jenis belanja menggunakan E - Katalog dalam bertransaksi, sedangkan aplikasi E- Katalog membutuhkan waktu yang lama dalam proses perampungan aplikasinya, maka laporan SPJ kegiatan yang akan dimasukkan ke sub. bagian keuangan tdk dapat diproses karena telah melewati batas waktu pengajuan GU.	Mengupayakan percepatan proses penyelesaian aplikasi E-katalog sehingga SPJ kegiatan yang terkendala E- katalog pada triwulan I dapat direalisasikan pada triwulan kedua.
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		Tidak tercapainya target penggunaan anggaran pada triwulan 1, disebabkan adanya beberapa SPJ yang telah	Melakukan upaya pembuatan dan pengajuan SPJ

			tersedia namun terkendala pada saat proses penginputan pada aplikasi dimana proses penginputan ini merupakan hal yang baru dengan proses yang agak panjang sehingga mengakibatkan sebagian besar SPJ tidak dapat terinput tepat waktu sesuai batas pengajuan SPJ. dalam proses penginputan SPJ pada aplikasi.	lebih awal dari batas waktu yang telah ditentukan untuk mengantisipasi jaringan internet yang terkadang kurang mendukung dalam proses penginputan SPJ pada aplikasi.
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)			
	Penetapan Wajib Pajak Daerah		Tidak tercapainya target penggunaan anggaran pada triwulan 1, disebabkan adanya SPJ yang telah tersedia namun terkendala pada saat proses penginputan pada aplikasi dimana proses penginputan ini merupakan hal yang baru dengan proses yang agak panjang sehingga mengakibatkan sebagian besar SPJ tidak dapat terinput tepat waktu sesuai batas pengajuan SPJ. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah untuk kegiatan Chek Point Tambang (MBLB) pada triwulan 1 sebesar Rp. 102.600.000	Untuk SPJ triwulan 1 yang belum terealisasi akan direalisasikan pada triwulan berikutnya. Melakukan upaya pembuatan dan pengajuan SPJ lebih awal dari batas waktu yang telah ditentukan untuk mengantisipasi jaringan internet yang terkadang kurang mendukung dalam proses

			belum terlaksana (masih proses sosialisasi dan penyusunan SK kegiatan).	penginputan SPJ pada aplikasi.
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		Rendahnya capaian realisasi anggaran pada TW 1 yaitu hanya sebesar 28,15% disebabkan terkendalanya proses pengajuan belanja karena jenis belanja ini menggunakan E - Katalog dalam bertransaksi, sedangkan aplikasi E- Katalog membutuhkan waktu yang lama dalam pengurusannya, sehingga SPJ kegiatan yang akan dimasukkan ke sub. bagian keuangan mengalami kendala dan tdk dapat diproses karena telah melewati batas pengajuan GU sampai habis masa triwulan pertama.	Mengupayakan percepatan proses penyelesaian aplikasi E-katalog sehingga SPJ kegiatan yang terkendala E- katalog pada triwulan I dapat direalisasikan pada triwulan kedua.
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		Rendahnya capaian realisasi keuangan TW I yaitu 47% disebabkan belum terealisasinya belanja ATK, belanja cetak, belanja bahan komputer, belanja kertas dan cover dan belanja makan minum rapat yang pengajuan belanjanya menggunakan E-Katalog. Proses E Katalog membutuhkan waktu yang lama sehingga SPJ yang masuk di keuangan melewati batas tanggal pengajuan GU	SPJ akan direalisasikan di Triwulan II

	Penagihan Pajak Daerah	1). Masih ada piutang pajak baik piutang tahun 2023 maupun piutang tahun berjalan yang belum dibayarkan. 2). Masih ada jenis pajak yang belum dilakukan penagihan. 3) Masih adanya wajib pajak yang lalai dan menghindari pajak.		1). Memaksimal melakukan upaya penagihan pajak ke wajib pajak. 2). Segera untuk menerbitkan / membuat SPTPD sebagai dasar untuk melakukan penagihan pajak. 3). Melakukan pemeriksaan kepatuhan wajib pajak.
--	------------------------	---	--	--

BAB

4

PENUTUP



IV. PENUTUP

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan 1 (satu) sasaran strategis dan 1 sasaran pendukung yang didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, serta Rencana Strategis (Renstra) Bapenda Tahun 2021-2026.

Secara umum hasil pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam pencapaian sasaran pada Triwulan I Tahun 2024, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Realisasi Anggaran Belanja APBD Triwulan I Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 5.465.477.641,00 (28,09 %) yang terdiri dari Belanja Operasi Rp.5.465.477.641,00 (28,09%) dan Belanja Modal Rp.0 (0,00%).
- b. Persentase Capaian Kinerja sasaran strategis Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah dengan indikator 1 “Persentase Penerimaan Pendapatan Daerah” yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Target TA. 2024 sebesar 95,40 % dengan realisasi 15,95 % dengan capaian 16,95 %,
- c. Persentase Capaian Kinerja sasaran strategis “Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah” dengan indikator 2 “Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah” yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Target TA. 2024 sebesar 26,07 % dengan realisasi 18,41 dengan capaian 70,61
- d. Tindak lanjut atas rekomendasi dari penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 adalah :
 - ÷ Sistematika Penulisan telah mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

- ÷ Dokumen Perencanaan Kinerja dan Laporan Kinerja telah dipublikasikan di Website Bapenda
 - ÷ Dokumen Laporan Kinerja telah melampirkan Surat Keputusan Tim Evaluasi Internal Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024
 - ÷ Dokumen Laporan Kinerja telah menyajikan data dalam bentuk bar chart atau grafik
 - ÷ Dokumen Laporan Kinerja telah menyandingkan capaian kinerja Tahun Berjalan dengan Tahun sebelumnya
 - ÷ Hasil pengukuran kinerja belum dapat dijadikan dasar pemberian penghargaan (reward) karena belum ada payung hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam pemberian reward dan punishment
 - ÷ Percepatan administrasi keuangan (SPJ)
- e. Faktor yang menjadi penghambat pencapaian kinerja Tahun Anggaran 2024 terhadap beberapa target sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur yaitu :
- Terdapat harga barang di e-catalog yang lebih tinggi dari harga di DPA - SKPD
 - Keterlambatan PPTK dalam merampungkan administrasi pertanggungjawaban keuangan
 - Pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan anggaran kas telah disusun
 - Terdapat beberapa kegiatan yang sifatnya disediakan sehingga penggunaan anggarannya disesuaikan dengan kondisi atau kejadian bencana
 - Pengolahan data dan informasi pada lingkup bidang yang belum maksimal
 - Ketergantungan Pendapatan Daerah dari sektor Pajak Daerah semakin tinggi, hal ini tidak diimbangi dengan upaya optimalisasi penerimaan dari sektor Lain-Lain PAD yang sah (Kontribusi BUMD), dimana penerimaannya relatif tidak berkembang;
- f. Adapun rekomendasi terkait peningkatan kinerja di masa mendatang yang perlu ditindaklanjuti oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut :

- Percepatan proses pengadaan melalui e-catalog
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap perjanjian kinerja secara berjenjang di tingkat SKPD
- Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang tertuang dalam KAK dan mengacu kepada anggaran kas yang telah ditetapkan
- Memaksimalkan penyebaran informasi terkait Pajak dan Retribusi melalui media sosial
- Memaksimalkan pengolahan data dan informasi lingkup OPD
- Mencermati kegiatan yang sifatnya disediakan untuk mengantisipasi SILPA program di akhir tahun
- Memprioritaskan program/kegiatan pengampuh Pengelolaan Pendapatan Daerah
- Meningkatkan koordinasi lintas sektoral terkait pengelolaan pendapatan daerah
- Menyesuaikan target pendapatan daerah secara terencana, dengan mempertimbangkan kebijakan anggaran Pemerintah, dinamika kondisi perekonomian nasional/regional, serta potensi riil berdasarkan perkembangan kondisi perekonomian masyarakat;
- Memperluas sumber-sumber penerimaan daerah (ekstensifikasi) sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam undang-undang;
- Memperdalam fasilitasi kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
 - Meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan membangun kesadaran pajak melalui program sosialisasi kebijakan dan pengembangan pelayanan Pajak Daerah untuk menciptakan masyarakat Luwu Timur yang taat membayar pajak (sustainable compliance);

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Triwulan I Tahun Anggaran 2024 diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak terkait pelaksanaan tugas fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur, sehingga memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja organisasi terhadap perkembangan tuntutan stakeholder, sehingga kontribusi Badan Pendapatan Daerah dalam pembangunan dapat lebih dirasakan manfaatnya .

Malili, April 2024

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR



MUHAMMAD SAID, SE,MM
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19790313 200502 1 010

LAMPIRAN





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
Nomor : 001/PK/BAPENDA/2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD SAID, SE.MM

Jabatan : KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

Jabatan : BUPATI LUWU TIMUR

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, Januari 2024

Pihak Kedua,
BUPATI LUWU TIMUR,


Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

Pihak Pertama,
KEPALA BADAN,


MUHAMMAD SAID, SE.MM

PERJANJIAN KINERA TAHUN 2024
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatnya penerimaan pendapatan daerah	Persentase penerimaan pendapatan daerah	95,40 %
		Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah	26,07 %
2	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Nilai LAKIP Hasil Evaluasi Internal Inspektorat	65,00

No	Nama Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.161.179.050,00
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.296.466.000,00
JUMLAH		19.457.645.050,00

Malil, Januari 2024

BUPATI LUWU TIMUR,


Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

Kepala Badan,


MUHAMMAD SAID, SE.MM

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
PENJELASAN KINERJA TAHUN 2024

Penjelasan Kinerja 1.

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah yang merujuk pada situasi dimana pendapatan yang diperoleh dari berbagai sumber meningkat dari waktu ke waktu. Pendapatan daerah dapat berasal dari berbagai sumber antara lain : Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain – Lain Pendapatan Yang Sah. Dengan meningkatnya penerimaan pendapatan daerah, pemerintah daerah memiliki lebih banyak sumber daya untuk membiayai berbagai program dan layanan publik, serta untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021 – 2026 Kabupaten luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026.

Indikator Kinerja:

Sasaran Kinerja ini memiliki 2 (dua) indikator yaitu:

1. Persentase Penerimaan Pendapatan Daerah

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber data
1.	Indikator Persentase Penerimaan Pendapatan Daerah ditetapkan sebagai indikator kinerja dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Nilai Persentase Penerimaan Pendapatan Daerah ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau dapat memberikan gambaran tentang kemandirian finansial dan diversifikasi sumber pendapatan suatu daerah	Realisasi Pendapatan Daerah dibagi dengan target pendapatan daerah dikalikan seratus	Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah dari Bidang

Target Kinerja:

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Penerimaan Pendapatan Daerah	95,40 %	Target tersebut ditetapkan berdasarkan target Renstra.

2. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber data
1.	Indikator Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah ditetapkan sebagai indikator kinerja dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Nilai Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau dapat memberikan gambaran tentang seberapa besar kontribusi PAD dalam membiayai pengeluaran dan pembangunan serta seberapa mandiri keuangan daerah dari sumber pendapatan lokal, semakin tinggi persentase ini semakin besar kemandirian finansial daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan realisasi pendapatan daerah dikalikan seratus	Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari Bidang

Target Kinerja:

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	26,07 %	Target tersebut ditetapkan berdasarkan target Renstra.

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran 2

Sasaran kedua pada Badan Pendapatan Daerah yaitu Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah. Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah peningkatan kualitas pada pencapaian kinerja yang diselenggarakan oleh masing-masing perangkat daerah. Pencapaian kinerja itu sendiri merupakan suatu proses yang dilakukan untuk dapat menghasilkan kinerja yang baik dan berkualitas sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dasar hukum dalam mencapai sasaran kinerja ini yaitu:

- Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur
- Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi Pemerintah. Oleh karena itu pengukuran kinerja perlu didukung dengan ketersediaan data kinerja.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja sasaran ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu:

1. Nilai SAKIP Hasil Evaluasi Internal Inspektorat

Indikator kinerja ini yang menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Nilai SAKIP Hasil Evaluasi Internal Inspektorat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasi, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah	Penilaian akuntabilitas merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.	Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen evaluasi AKIP	Hasil evaluasi internal AKIP Inspektorat

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Nilai SAKIP Hasil Evaluasi Internal Inspektorat	70,00	Target yang ditetapkan berdasarkan pada hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 oleh Inspektorat Kabupaten yaitu 69,50 (B) yang mana telah melampaui target akhir Renstra 2021-2026, sehingga Badan Pendapatan Daerah mengacu pada realisasi Tahun 2022 sementara realisasi Tahun 2023 belum ada. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka ditetapkan target untuk periode Renstra pada tahun 2024 sebesar 70,00 (Nilai) Angka tersebut termasuk dalam kategori Baik dengan nilai (>60 – 70).

Kepala Badan,


MUHAMMAD SAID, SE,MM
 NIP. 19790113 200502 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Soekarno Hatta No. Telp. (0474) 321435 Fax (0474) 321435

M A L I L I, 92981

KEPUTUSAN KEPALA PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR :05.A/I/Tahun 2024

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679).

2. Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAM/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apratur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAM/141/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012- 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur 70)
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11)
6. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024
- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja Anggaran, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja
- KEDUA** : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja disampaikan kepada Bupati Luwu Timur .

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malili
pada tanggal : 3 Januari 2024

Kepala Badan,



MUHAMMAD SAID, SE. MM
Pangkat : Pembina Tk I
NIP : 19790313 200502 1 010

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR ~~54~~ TAHUN 2024
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. **Nama Organisasi** : BADAN PENDAPATAN DAERAH
2. **Tugas Pokok** : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
3. **Fungsi Utama** :
 - a. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah
 - b. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan pendapatan daerah
 - c. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
 - d. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Badan Pendapatan Daerah

4. Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN
1	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah	Persentase Penerimaan Pendapatan Daerah	%
		Persentase PAD terhadap Pendapatan daerah	%

5. Definisi Operasional, Formulasi dan Sumber Data

Sasaran Strategis

Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah

Definisi Operasional :

Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah merujuk pada situasi dimana pendapatan yang diperoleh suatu wilayah atau daerah dari berbagai sumber meningkat dari waktu ke waktu. Pendapatan daerah dapat berasal dari berbagai sumber antara lain : Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain – Lain Pendapatan Yang Sah. Dengan meningkatnya penerimaan pendapatan daerah, pemerintah daerah memiliki lebih banyak sumber daya untuk membiayai berbagai program dan layanan publik, serta untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Indikator 1 :

Persentase Penerimaan Pendapatan Daerah

Definisi Operasional :

Persentase Penerimaan Pendapatan Daerah adalah rasio atau proporsi dari total pendapatan yang diterima oleh suatu daerah atau wilayah terhadap pendapatan keseluruhan yang dapat diperoleh dari berbagai sumber. Ini menggambarkan kontribusi relatif dari penerimaan yang diperoleh dari pendapatan daerah terhadap pendapatan total suatu daerah. Penerimaan pendapatan daerah dapat diperoleh dari

berbagai sumber pendapatan daerah antara lain :

1. Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
2. Pendapatan Transfer yang terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya, Transfer Pemerintah Propinsi
3. Lain – Lain Pendapatan Yang Sah yang terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak, Pendapatan Bagi Hasil Lainnya

Formulasi Perhitungan :

$$\frac{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}}{\text{Target Pendapatan Daerah}} \times 100$$

Penjelasan Formula :

Persentase ini dapat dihitung dengan membagi jumlah pendapatan yang diperoleh dari berbagai sumber pendapatan daerah (seperti Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah) dengan total pendapatan daerah, lalu mengalikannya dengan 100 untuk mendapatkan nilai dalam bentuk persentase. Ini menunjukkan seberapa besar bagian pendapatan daerah dari total pendapatan yang ada. Analisis ini memberikan gambaran tentang kemandirian finansial dan diversifikasi sumber pendapatan suatu daerah

Sumber Data :

Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah

Penjelasan :

Sumber Data adalah Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah yang direkap setiap bulan melalui Bidang terkait

Indikator 2 :

Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah

Definisi Operasional :

Persentase PAD terhadap pendapatan daerah adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa besar PAD menyumbang terhadap total pendapatan yang diperoleh oleh suatu daerah atau pemerintahan lokal. PAD mencakup berbagai

sumber pendapatan yang dihasilkan secara lokal, seperti pajak dan retribusi daerah, hasil usaha milik daerah, serta pendapatan lainnya yang diperoleh dari sumber – sumber lokal.

Persentase PAD terhadap pendapatan daerah menunjukkan seberapa besar kontribusi PAD dalam membiayai pengeluaran dan pembangunan di suatu daerah, serta seberapa mandiri keuangan daerah tersebut dari sumber pendapatan lokalnya. Semakin tinggi persentase ini, semakin besar kemandirian finansial daerah tersebut.

Formulasi Perhitungan :

$$\frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100$$

Penjelasan Formula :

Persentase ini dapat dihitung dengan membagi jumlah pendapatan yang diperoleh dari berbagai sumber Pendapatan Asli Daerah (seperti Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah) dengan total Pendapatan Daerah, lalu mengalikannya dengan 100 untuk mendapatkan nilai dalam bentuk persentase.

Analisis ini menggambarkan kontribusi relatif dari pendapatan yang diperoleh dari sumber – sumber internal daerah terhadap pendapatan asli daerah tersebut.

Sumber Data :

Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Penjelasan :

Sumber Data adalah Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang direkap setiap bulan melalui Bidang terkait

Kepala Badan Pendapatan Daerah ,



MUHAMMAD SAID, SE. MM

Pangkat : Pembina Tk I

NIP : 19790313 200502 1 010

POHON KINERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kinerja Strategis

Kinerja Taktikal

Kinerja Operasional

